

Tiga Reformasi untuk Indonesia Berkemajuan

Ir H Joko Widodo

Muhammadiyah sebagai pembawa misi Islam berkemajuan terbukti telah menjadi kekuatan transformatif terbangunnya tata kehidupan umat yang lebih baik. Saya tahu, saat ini Muhammadiyah telah memiliki 4.623 TK; SD dan Madrasah Ibtidaiyah 2.252; SMP dan MTs 1.632; SMA, SMK, dan MA 1.291; dan PTM 171. Ini adalah kekuatan yang sangat besar. Belum lagi Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan 2.119. Ditambah lagi dengan pesantren, Panti Asuhan, dan Panti Jompo. Saya percaya jika misi Islam berkemajuan mampu menjadi kekuatan yang harus dijaga terus. Kalau komitmen itu dijaga terus dan gotong-royong bersama-sama, kita akan mampu mewujudkan masyarakat yang maju, berdaulat, dan berkeadilan.

Untuk mewujudkan pemerataan ekonomi tahun 2017 ini, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan ekonomi. Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, yang pada tahapan awal, akan fokus kepada tiga sektor penting: *reformasi agraria dan redistribusi aset, akses keuangan dan permodalan, dan peningkatan sumber daya manusia.*

Pertama, *Reformasi agraria dan redistribusi aset.* Dengan program ini, yang kita mau adalah rakyat menjadi pemilik. Seluruh rakyat memiliki sesuatu yang berharga yaitu *sebidang tanah.* Tanah adalah permulaan dari segalanya.

Hampir di semua negara kaya, memulai perjalanannya dari reformasi agraria. Rakyat yang awalnya tidak punya apa-apa, diberikan hak legal atas lahan yang mereka duduki, menjadi seorang pemilik, *owner.* Maka, di



Sumber Foto: Dwi Agus M

semua negara maju, isu *property rights* demikian fundamental. Dari sanalah orang berkembang dengan status legal yang jelas, mempunyai kedudukan atas tanah yang jelas. Inilah tujuan reformasi agraria dan distribusi aset.

Kedua, *akses permodalan.* Kalau melihat di negara kita, saat ini ekonomi syariah baru berjalan kurang lebih 5% dari pangsa pasar yang ada. Masih ada kesempatan 95% pangsa pasar yang bisa dikembangkan. Bisnis syariah, bukan hanya perbankan syariah, namun bidang-bidang yang lain, seperti industri, hotel, wisata, masih banyak lagi kesempatan yang bisa dimasuki. Malaysia sudah berada pada posisi 35% lebih. Artinya, negara dengan jumlah Muslim terbesar, pangsa pasar itu masih sangat menjanjikan untuk dikembangkan.

Ketiga, *peningkatan sumberdaya manusia.* Dua bulan lalu, saya perintahkan Menteri Keuangan menghitung kira-kira di tahun 2045, dalam kondisi normal seperti ini, Indonesia akan seperti apa dalam hitungan penduduk, PDB, dan income per kapita. Tahun 2045 (100 tahun Indonesia merdeka), kita akan memiliki penduduk kurang lebih 309.000.000 jiwa. PDB kita,

kalau normal seperti ini, pertumbuhan ekonomi di atas 5% atau minimal 5%. Dan jika tidak ada goncangan politik, PDB kita akan masuk ke angka US\$ 9,1 Trilyun (atau Rp. 120.000 Trilyun). Setelah dihitung Bu Menteri, income per kapita kita tahun 2045 akan menjadi US\$ 29.000 (sekarang US\$ 3.450). Dan jika itu benar-benar terjadi, Indonesia akan menjadi empat ekonomi terbesar dunia. Dan ini butuh konsistensi, kerja keras, dan estafet kepemimpinan yang baik.

Angkatan kerja kita sekarang posisinya adalah 42% lulusan SD, 66% lulusan SD dan SMP, dan 82% lulusan SD/SMP/SMK. Sementara ada problem bonus demokrasi di tahun 2025-2030, Untuk itu, saya meminta Prof Muhadjir Effendi betul-betul fokus ke *pendidikan vokasional dan vocational training.* Karena yang kita hadapi sudah jadi. Dunia pendidikan kita, khususnya di *vocational school,* problemnya tidak mudah. Harusnya 80% gurunya adalah guru-guru pelatih. Fakta yang ada adalah 80% gurunya adalah guru normatif, seperti Pancasila, Bahasa Indonesia, Kimia. Sehingga keluarannya hampir mirip dengan lulusan SMA. Tidak punya skill.

Saya percaya, Muhammadiyah ke depan akan semakin bekerja keras mewujudkan Indonesia yang berkemajuan dan NKRI yang *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.* Sebuah tatanan hidup yang berkeadilan dan berpihak kepada kaum *mustadh'afin,* kaum tertindas. •

Ir H Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Disarikan dari *Pidato Pembukaan Tanwir Muhammadiyah di Ambon pada 24 Februari 2017.*